

BAB IV

ANALISA INTERVENSI RUSIA DI KONFLIK GEORGIA-OSSETIA

SELATAN

Intervensi yang dilakukan Rusia pada konflik Georgia-Ossetia Selatan merupakan bentuk politik luar negeri Rusia. Tindakan tersebut dilakukan Rusia tentunya dilandasi oleh faktor-faktor/alasan, baik itu internal (dalam negeri) maupun eksternal (luar negeri). Literatur akademis tentang konflik di Ossetia Selatan sangat bervariasi berkaitan dengan akar permasalahan. Misalnya, beberapa ilmuwan berpendapat bahwa keinginan Rusia untuk mempertahankan hegemoni di wilayah ini merupakan akar dari konflik kekerasan ini. Yang lain berpendapat bahwa penganiayaan dan pengabaian Georgia terhadap etnis Ossetia yang tinggal di Georgia adalah penyebab utama. Yang lainnya masih menyalahkan orang-orang Barat pada lingkup pengaruh politik Rusia (dengan mengutip perluasan NATO yang terus berlanjut, meningkatkan bantuan militer Amerika ke negara-negara bekas Soviet dan pementasan latihan militer di wilayah ini). Sebagai tambahan, kelompok ilmuwan terakhir melihat pecah Uni Soviet sebagai akar penyebab masalah tersebut.

Kenyataannya, tidak ada satupun teori yang bisa menjelaskan penyebab konflik Ossetia Selatan dengan baik. Sebaliknya, semua penjelasan yang telah disebutkan sebelumnya tentang penyebab konflik Ossetia Selatan memberikan perspektif penting tentang asal mula konflik ini. Sebenarnya, konflik Ossetia Selatan dimulai sebagai sebuah konflik separatis setelah pembubaran Uni Soviet ketika Ossetia Selatan mencoba untuk memisahkan diri dari Georgia. Dalam pengertian ini, runtuhnya Uni Soviet dan kemunculan gerakan separatis dapat dipandang sebagai akar penyebab konflik.

Salah satu teori yang kuat dalam analisa penyebab konflik ini dituangkan oleh Cory Welt pada artikelnya yang diterbitkan pada tahun 2005. Cory Welt menyebutkan bahwa

keterlibatan Rusia dalam konflik separatis Ossetia (entah dengan sengaja atau tidak) menghalangi proses perdamaian dengan menghasilkan jalan buntu dalam negosiasi mengenai status hukum daerah-daerah yang memisahkan diri. Dia juga menulis, “berkat dukungan Rusia untuk kemerdekaan de facto Abkhazia dan Ossetia Selatan, keseimbangan kekuatan negosiasi antara Georgia dan wilayah-wilayah yang memisahkan diri terlalu miring untuk diceritakan, jika ada kesempatan untuk mempromosikan penyatuan kembali yang damai. Saat ini, pemimpin daerah tidak perlu melakukan negosiasi yang akan menghasilkan penyelesaian apapun selain yang melembagakan status mereka sebagai protektorat Rusia. Namun, ini bukan satu-satunya cara Rusia untuk memperpanjang konflik di Georgia, tindakan militer Rusia baru-baru ini di Georgia memiliki prospek perdamaian yang lebih rumit di masa depan dengan menginternasionalisasi konflik tersebut”.

Pada bab ini penulis akan menganalisa apa saja alasan atau faktor pemicu intervensi yang dilakukan Rusia terhadap konflik Georgia-Ossetia Selatan.

A. Mempertahankan Dan Meningkatkan Pengaruh Rusia Di Kawasan Kaukasus

Dalam menganalisa permasalahan keamanan Rusia, ada dua aspek penting yang perlu diperhatikan Rusia terutama dalam hal menjaga stabilitas keamanan wilayahnya. Pertama, hubungan pemerintah pusat dengan warganya. Warga negara Rusia tidak hanya terdiri dari orang-orang Rusia yang tinggal di dalam wilayah Rusia, melainkan juga orang-orang Rusia yang tinggal di luar wilayah Rusia. Besarnya jumlah penduduk Rusia yang tinggal di luar wilayah Rusia terutama di kawasan Eks-Uni Soviet mengakibatkan Rusia harus meningkatkan hubungan kerjasama dengan pemerintah yang berwenang dimana orang-orang Rusia tersebut tinggal. Kedua, hubungan pemerintah Rusia dengan pemerintah negara lain dalam kaitannya focus terhadap kawasan regional CIS. Peningkatan hubungan bilateral Rusia dengan negara-negara di kawasan CIS merupakan faktor penting yang mampu menjaga kestabilan wilayah Rusia, karena secara tidak langsung setiap terjadi konflik internal di dalam

negara-negara CIS akan mengganggu kestabilan Rusia. Untuk itu, peningkatan hubungan kerjasama perlu dilakukan.

Seperti yang telah di jelaskan penulis pada bab pertama, bahwa intervensi militer merupakan salah satu bentuk strategi atau metode yang dilakukan sebuah negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya dan menerapkan kebijakan luar negerinya. Pada kasus intervensi Rusia pada konflik Georgia-Ossetia salah satu bentuk kepentingan yang ingin dicapai oleh Rusia adalah menjaga stabilitas keamanan nasional. Lebih luas lagi, sebagai pewaris kekuatan Uni Soviet, Rusia sampai saat ini selalu menekankan terhadap bekas wilayah Uni Soviet, baik yang di kawasan Eropa Timur maupun Asia Tengah. Wilayah Eropa-Asia merupakan orientasi geopolitik terpenting bagi Rusia. Rusia sendiri menginginkan status great power dan menjadi oposisi dari unilateralisme Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di NATO. Great power akan tercapai apabila Rusia menjalankan politik luar negeri yang waspada terhadap persaingan geopolitik dan mampu mempertahankan wilayah Eurasia.

Secara strategis, Rusia telah melakukan beberapa tindakan untuk menjaga stabilitas keamanan serta proses reintegrasi negara-negara eks-soviet dengan membentuk CIS (*commonwealth of independent state*). Negara anggota CIS percaya bahwa kepentingan nasional negara anggota yang berpartisipasi dalam integrasi tersebut akan diakomodir oleh Rusia. Kebanyakan mayoritas negara republik pasca Soviet bergantung pada Rusia dalam hal solidaritas politik dan bantuan militer. Persepsi populer terhadap Rusia sebagai '*centre of gravity*' tidak hanya karena luasnya wilayah dan besarnya sumber daya alam yang dimiliki oleh Rusia. Tapi karakter ideologi, politik, sejarah dan budaya yang di miliki Rusia lah yang menjadikan Rusia di anggap sebagai penanggung jawab utama dalam proses integrasi kawasan eks-soviet (Hutabarat). Pengalaman di Uni Soviet tentang pengamanan daerah atau wilayah menjadikan Rusia paham dan tahu harus bagaimana bersikap untuk menjaga segala

perbatasan yang ada. Gangguan sedikitpun akan segera diselesaikan dengan segala kemampuan Rusia yang saat ini besar dan bisa dikatakan dengan seimbang dengan kekuatan yang dimiliki oleh Amerika Serikat, bahkan beberapa pengamat mengatakan Rusia jauh di atas Amerika Serikat dalam segala aspek baik ekonomi, militer, politik dan sosial-budaya walaupun hal itu tidak terlalu vulgar di tampilkan di media-media besar yang notabene adalah termasuk dalam jaringan alat propaganda Amerika Serikat (Juwita).

Untuk mewujudkan kepentingan stabilitas keamanan tersebut, segera setelah dilantik menjadi presiden Rusia Vladimir Putin langsung bergerak cepat dengan mengeluarkan tiga dokumen yang menjadi pedoman tentang sikap dan arah kebijakan dalam dan luar negeri dari Rusia. Adapun dalam the National Security Concept beberapa hal menjadi fokus utama, National Security Concept ini dibagi kedalam empat poin berbeda, poin pertama membahas tentang sikap Rusia dalam menghadapi ancaman dari dunia internasional atau dalam menghadapi isu-isu yang dianggap dapat mengancam keamanan serta kestabilan negara Rusia. Dalam poin pertama ini juga Rusia berusaha menunjukkan komitmen dan keinginannya dalam menyelesaikan masalah keamanan internasional. Poin kedua pada National Security Concept membahas tentang kepentingan Rusia dalam hal isu keamanan baik pada ranah nasional, regional maupun internasional. Adapun kepentingan-kepentingan ini menyangkut pertahanan kedaulatan, pencegahan agresi militer terhadap Rusia dan aliansinya, memperkuat posisi sebagai negara besar dan salah satu negara dengan pengaruh terbesar di dunia yang multipolar. Poin ketiga dalam dokumen ini membahas tentang hal-hal yang dianggap sebagai ancaman bagi keamanan nasional Rusia. Beberapa yang menjadi isu yang dianggap mengancam bagi Rusia adalah potensi untuk melemahkan pengaruh Rusia dalam bidang politik, ekonomi dan militer di dunia internasional, ekspansi NATO dan blok-blok militer lainnya kewilayah Timur atau negara tetangga Rusia, potensi pengembangan senjata pemusnah massal oleh negara-negara lain. Dan pada poin ini juga disebutkan salah

satu ancaman keamanan bagi Rusia adalah konflik perbatasan baik di Rusia maupun negara di sekitar wilayah Rusia. Poin terakhir dalam dokumen ini membahas tentang bagaimana kebijakan Rusia seharusnya dirumuskan untuk memastikan keamanan nasional bagi Rusia, dalam poin ini Rusia menekankan bahwa pengendalian terhadap senjata pemusnah massal dan barang-barang militer lainnya menjadi fokus utama agar tercipta keamanan baik bagi Rusia maupun dunia internasional (Association, 2000).

Keputusan Georgia untuk keluar dari CIS adalah awal dari munculnya keputusan untuk mengintervensi konflik tersebut. Alasan Georgia untuk mengundurkan diri dari keanggotaan CIS dikarenakan Georgia menganggap bahwa dominasi Rusia pada komunitas tersebut terlalu kuat dan Georgia lebih cenderung ingin menjadi negara demokrasi seperti ideologi yang di pegang oleh blok Barat dan lebih memilih untuk mendekati diri kepada NATO yang di ketuai oleh AS. Dari alasan itu, Rusia menganggap bahwa kecenderungan Georgia kepada NATO akan sangat mengganggu stabilitas dan proses reintegrasi kawasan eks-soviet.

Kawasan Kaukasus dapat dikatakan sulit untuk dipisahkan dari strategi keamanan Rusia. Secara umum, Rusia berkepentingan untuk menjaga keutuhan wilayahnya di bagian selatan yang menjadi perbatasan (Dagestan, Chechnya, dan Ossetia Utara). Hal ini berkaitan dan sejalan dengan kebijakan luar negeri Rusia terhadap negara-negara di kawasan tersebut yaitu Georgia, Armenia, dan Azerbaijan. Rusia akan selalu mengambil langkah tegas karena pentingnya posisi Kaukasus yang di dalamnya sudah termasuk Georgia, Ossetia Selatan, dan Abkhazia. Apa yang dilakukan oleh Rusia tidak terlepas dari kekhawatiran akan menguatnya pengaruh pro-Amerika melalui beberapa peluang yang diciptakan, seperti dukungan finansial pada masa-masa perubahan kepemimpinan di Georgia (Fahrudodji, Konflik Ossetia Selatan dan Strategi Keamanan Rusia di Kawasan Kaukasus, 2009).

Rusia masih memandang wilayah kaukasus rawan dengan konflik, sehingga Rusia masih perlu ikut turun tangan guna menjaga stabilitas keamanan di wilayah itu. Selama ini Rusia

juga masih menerapkan kebijakan yang keras dengan mengedepankan kekuatan militernya. Faktor pendorong Rusia dalam penerapan kebijakan itu adalah Rusia sadar bahwa saat ini semua negara berusaha untuk memperluas pengaruhnya baik dengan menggunakan *hard power* atau *soft power*. Bagi Rusia kekuatan militer merupakan salah satu cara merepresentasikan kebijakan luar negerinya karena pencegahan terhadap perang sangat sulit untuk dilakukan. Bagi para pembuat kebijakan Rusia saat ini negara-negara tidak lagi menggunakan pendekatan politik di antara sesama negara. Dengan kata lain, negara dengan kekuatan militer yang besar merupakan ancaman bagi Rusia.

Walaupun disitu tidak di jelaskan secara khusus bahwa Ossetia Selatan merupakan prioritas. Namun Rusia tidak ingin mengambil resiko jika Ossetia Selatan tetap berada di wilayah kekuasaan Georgia sedangkan Georgia menunjukkan ketertarikannya untuk bergabung dalam keanggota NATO. Karena sudah tentu hal tersebut akan sangat mengganggu stabilitas keamanan Rusia. Selain itu Rusia juga masih memiliki keuntungan secara geografis, ekonomi, sosial dan budaya melalui peninggalannya di Ossetia Selatan pada era Soviet lalu. Asset-aset akan dibutuhkan untuk memastikan interdependensi antara Rusia dan negara eks-Soviet.

Rusia beberapa kali melancarkan operasi militer ketika Georgia berusaha mempertahankan Abkhazia dan Ossetia Selatan. Selain itu upaya Rusia untuk tetap mempertahankan pengaruhnya di kawasan Eropa Timur terlihat pada perilaku Rusia terhadap Georgia terkait dengan keinginan Georgia untuk menjadi anggota NATO dan UE. Rusia memiliki sejumlah kekhawatiran bahwa negara tersebut akan tersedot dalam pengaruh UE. Begitu pula perlakuan Rusia terhadap Ukraina. Ketika Ukraina mendapat tawaran untuk menjadi anggota terakhir UE, keinginan Ukraina untuk menjadi anggota UE tersebut terus mendapat halangan dari Rusia. Misalnya, Rusia melihat pemilihan umum di Ukraina pada

November 2004 lalu mendapat pengaruh usaha Barat untuk menyedot Rusia dalam struktur NATO-EU yang akhirnya berujung pada terjadinya Revolusi Oranye (Sanders, 2006)

Gleb Pavlosky, penasihat mantan Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan, kepemimpinan di Rusia telah menyimpulkan bahwa setelah Revolusi Oranye di Ukraina, Moskwa ingin mencegah hal serupa terjadi lagi. Rusia menganggap Ukraina dan Georgia, yang juga mengalami Revolusi Mawar yang memenangkan Saakashvili, sebagai pengaruh buruk di kawasan Rusia. Fakta bahwa Georgia didukung Barat membuatnya menjadi sasaran empuk. Kesalahan Saakashvili adalah terlalu percaya diri bahwa Barat akan berada di belakangnya. Rupanya, dia salah perhitungan karena Barat hanya bisa bersuara keras tanpa bisa bertindak lebih jauh. Rusia memanfaatkan retorika Barat yang disebut intervensi kemanusiaan untuk ikut serta dalam ‘pertunjukkan’ Georgia-Ossetia Selatan (Ninik, 2008).

Pemerintahan Rusia dengan terang-terangan memang mendukung pemisahan diri Ossetia Selatan untuk menjadi negara yang merdeka dan berdiri sendiri. Penyerangan Georgia ke Ossetia Selatan direspon dengan serangan balik oleh Rusia, mereka menggempur lewat darat dan udara, tidak hanya membebaskan Ossetia Selatan, tapi juga menyerang jauh ke wilayah Georgia. Rusia melumpuhkan radar militer, bandara serta basis militer Georgia. Negeri itu kian terjepit karena Rusia juga menyerang melalui Abkhazia, yang sejak lama ingin memisahkan diri dari Georgia. Ribuan tentara Rusia juga ikut menyerang pasukan Georgia dan memberi ruang bagi kapal-kapal perang Rusia untuk membuat basis militer di perairan Laut Hitam(news, 2014).

Inti kepentingan Rusia salah satunya terletak pada masalah keamanan nasionalnya. Berdasarkan kedudukan geostrateginya Rusia memiliki rasa terancam yang kuat atas bangsa-bangsa lain. Seperti yang sempat disinggung di paragraf sebelumnya, Rusia tidak mirip Amerika Serikat. Rusia mempunyai benteng alami berupa dua samudra di pantai Timur dan Baratnya, memiliki perbatasan darat langsung paling panjang di dunia dengan banyak negara.

Dengan kedudukan *land locked position* ini Rusia sangat bergantung pada situasi seberang perairannya. Untuk itu perlu dilakukan upaya dan strategi pengamanan wilayah di sekitar perbatasannya. Itu dapat dilakukan melalui pembentukan daerah penyangga (*bufferzone*) yang bukan hanya berfungsi sebagai benteng pengaman tetapi juga sebagai alas pijak untuk memproyeksikan kekuatan militernya (Fahrurodji, Konflik Ossetia Selatan dan Strategi Keamanan Rusia di Kawasan Kaukasus, 2009).

Karena itu, perluasan keanggotaan NATO ke wilayah negara-negara satelit eks Uni Soviet seperti salah satunya Georgia sudah barang tentu akan dipersepsikan sebagai ancaman yang sangat potensial bagi kedaulatan teritorial Rusia. Jadi, adalah suatu kewajiban bagi Rusia untuk menjawab tantangan Amerika Serikat sebagai otak dari setiap keterlibatan NATO pada setiap konflik yang mungkin timbul di mandala Erioa, dengan senjata konvensional maupun nuklir.

B. Mencegah Masuknya Kekuatan As Di Kawasan Eks-Soviet

Setelah berakhirnya era Perang Dingin yang ditandai dengan runtuhnya pemimpin kekuatan blok Timur, Uni Soviet, tatanan dunia semakin rumit, bahkan semakin rumit bila dibanding era perang ideologi antara Uni Soviet melawan NATO (*North Atlantic Treaty Organization*). NATO sebagai pemenang Perang Dingin semakin lama semakin berusaha memperkuat ideologinya, bahkan ke wilayah-wilayah yang seharusnya bukanlah tempat NATO. Mereka melakukan perluasan ke timur Eropa, hingga mencapai negara-negara bekas Uni Soviet yang telah terpecah belah, seperti Ukraina dan Georgia. Meskipun rencana perluasan hanyalah wacana dan belum terealisasikan, namun Rusia, sebagai negara pecahan Uni Soviet terbesar, berusaha untuk mencegah agar NATO yang dipimpin oleh Amerika Serikat tidak dapat mengajak negara-negara Eropa Timur bergabung.

Kekalahan Uni Soviet dalam Perang Dingin memberikan peluang bagi NATO untuk menyebarkan pengaruhnya ke wilayah Eropa Timur. Pada awal pembentukan pakta warsawa,

wilayah Eropa Timur merupakan bagian dari penerapan kebijakan Luar Negeri Uni Soviet. Namun sayangnya, ketakutan akan kebangkitan ideologi komunisme dan ancaman munculnya rezim Stalin baru membuat negara-negara yang tergabung di dalam pakta warsawa harus mengundurkan diri. Hal ini lah yang dipandang NATO sebagai salah satu faktor keberhasilannya menghancurkan Uni Soviet selain krisis ekonomi yang memang sedang melanda Uni Soviet pada saat itu (Fahrurudji, Rusia Baru Menuju Demokrasi: Pengantar Sejarah dan Latar Belakang Budaya, 2005, hal. 224)

Pergerakan ekspansi NATO ke wilayah Timur mulai terlihat saat Polandia, Republik Ceko, Hungaria, dan Baltik bergabung ke dalamnya. Setelah menyadari itu, pergerakan politik maupun militer apapun yang Rusia tidak tergabung di dalamnya di anggap sebagai ancaman keamanan Rusia (Fahrurudji, Rusia Baru Menuju Demokrasi: Pengantar Sejarah dan Latar Belakang Budaya, 2005, hal. 224).

Kekhawatiran Rusia terhadap rencana perluasan NATO di wilayah Eropa Timur menjadi sebuah tekanan yang besar untuk Rusia, karena Rusia sendiri masih berusaha untuk menunjukkan kepada masyarakat internasional bahwa Rusia masih menjadi negara yang kuat dan mendominasi di dunia. Hal tersebut tentunya akan menjadi polemik yang cukup berat bagi Rusia karena harus *attack* dan *defence* dalam waktu yang hampir bersamaan.

Setelah pemerintahan negara Georgia baru yang pro-Barat dan menjunjung demokrasi muncul pada tahun 2003, Russia mulai menunjukkan ketidaksukaannya pada Georgia yang pro-Barat. Rusia yang sebelumnya bertindak sebagai mediator dan penjaga perdamaian dalam konflik Georgia dengan Abkhazia dan Ossetia Selatan, perlahan ikut menjadi bagian dari konflik tersebut (Cornell, Georgia After The Rose Revolution: Geopolitical Predicament and Implications for U.S. Policy, 2007). Rusia secara konsisten mendukung gerakan *secessionism* melawan Georgia, baik secara politik maupun militer sejak awal tahun 1990-an. Rusia menolak untuk menarik pasukannya dari basis militernya di wilayah Georgia. Rusia juga

menjatuhkan bom di beberapa targetnya di wilayah Georgia. Berbagai cara dilakukan Rusia untuk menjatuhkan pemerintahan Rusia, termasuk tekanan ekonomi melalui ketergantungan Georgia akan energi Rusia.

Georgia sangat menikmati bantuan dari AS dan negara-negara di Eropa Tengah, kecuali Jerman dan negara-negara yang memiliki kedekatan hubungan ekonomi dan politik dengan Rusia (Perancis, Itali, Yunani dan Spanyol). Mereka yang memiliki relasi dekat dengan Rusia menganggap bahwa keikutsertaan NATO di konflik Georgia akan merusak hubungan Rusia-NATO. Selain itu, negara yang sedang mengalami konflik juga disarankan untuk bergabung dalam keanggotaan NATO (Group I. C., *Georgia and Russia: Clashing Over Abkhazia*, 2008).

Keinginan untuk bergabung ke dalam keanggotaan NATO sebenarnya sudah diwacanakan sejak kepemimpinan Shevardnadze. Tapi pada saat Saakashvili menjabat, wacana tersebut dijadikan prioritas utama. Karena dia melihat adanya jaminan kemerdekaan dan secara penuh dari Rusia, keamanan, stabilitas, dan integritas wilayah jika Georgia sudah masuk ke dalam keanggotaan NATO. Pada referendum yang diadakan pada tahun 2008, pemerintah Georgia melakukan voting kepada warganya untuk mengetahui respon dari warganya mengenai wacana keanggotaannya ke dalam NATO. Dan hasilnya 77% warga Georgia setuju agar Georgia bergabung ke dalam NATO. Dari hasil voting tersebut pemerintah Georgia semakin yakin dengan keputusannya untuk bergabung menjadi keanggotaan NATO. Setelah mendapatkan hasil dari voting tersebut, pemerintah Georgia mengeluarkan kebijakan MAP (*Membership Action Plan*) yaitu kebijakan mengenai percepatan *follow up* keanggotaan Georgia ke dalam NATO. Karena Georgia khawatir, jika Georgia tidak segera mengurusnya Rusia akan menghambat kepentingannya tersebut (Group I. C., *Georgia and Russia: Clashing Over Abkhazia*, 2008, hal. 14).

Usaha Georgia untuk menjadi anggota NATO juga dinilai tidak setengah-setengah, Georgia bersikeras untuk menjadi anggota NATO dengan turut serta aktif menurunkan militer Georgia bersama AS, yaitu kegiatan di Afghanistan dan misinya di Irak. Tidak hanya menurunkan pasukan militernya bersama NATO, Georgia juga mulai memperluas demokrasi serta perbaikan institusional di dalam negerinya. Tindakan ini dilakukan oleh Georgia sebagai refleksi dari keinginannya untuk bergabung menjadi anggota NATO. Jika Georgia berhasil, maka Georgia akan diterima menjadi anggota NATO, karena telah memenuhi syarat yang diajukan oleh NATO.

NATO menekankan bahwa Rusia tidak dapat mem-veto keinginan Georgia untuk masuk ke dalam keanggotaan. Sekretaris NATO, Jaap de Hoop Scheffer, mengatakan, jika sebuah negara memenuhi kriteria dan dia mempunyai keinginan yang kuat untuk bergabung dengan NATO tidak ada alasan untuk menolaknya (Group I. C., *Georgia and Russia: Clashing Over Abkhazia*, 2008, hal. 14)

Dengan adanya invansi NATO terhadap negara-negara disekitar wilayah Rusia, secara politis membuat Rusia terancam. Rusia merasa bahwa NATO menghalanginya untuk menjadi negara yang berpengaruh di kancah Internasional. Intimidasi yang dirasa oleh Rusia akibat NATO ini, mengakibatkan Rusia mengeluarkan kebijakan militer dalam bentuk doktrin militer dengan kebijakan peningkatan kekuatan militer (Hardoko, 2015).

Rusia melihat perluasan NATO ke wilayah timur merupakan sebuah ancaman langsung. Padahal pada negosiasi yang di adakan di Jerman pada tahun 1990 Rusia telah di janjikan tidak akan ada ekspansi NATO ke wilayah Timur jauh. Mereka menyepakati dominasi di masing-masing wilayah. Tapi NATO tidak mematuhi kesepakatan tersebut dan Rusia juga tidak dapat menuntutnya karena perjanjiannya di bentuk secara informal dan tidak ditulis dalam dokumen resmi (Group I. C., *Georgia and Russia: Clashing Over Abkhazia*, 2008, hal. 15)

Rusia terintimidasi dengan melihat Amerika Serikat dan sekutunya yang sampai sekarang masih berusaha memperebutkan hegemoni dan pengaruhnya di Eropa, Asia, serta negara-negara lain di seluruh dunia. Pengajuan diri Georgia yang begitu disambut hangat oleh Amerika Serikat, serta keseriusan Georgia dengan menjadi anggota NATO dan Uni Eropa membuat Rusia khawatir, karena Rusia merasa bahwa AS ingin mendominasi kekuatannya di Eropa Timur. Fase perang dingin antara Georgia dan Rusia pun dimulai.

Rencana perluasan NATO ke timur memberikan ketakutan tersendiri bagi Rusia. Perluasan NATO tersebut dikhawatirkan akan merusak keseimbangan strategis AS dan Rusia di Eropa Timur, karena pengaruh AS di kawasan tersebut akan semakin besar. Rusia terlihat melancarkan usaha pembendungan terhadap rencana ekspansi dan perluasan pengaruh negara-negara Barat di Eropa Timur. Hal ini tak terlepas dari fokus utama kebijakan luar negeri Rusia yang masih terkait dengan kebijakan luar negeri AS dan kebijakan keamanan (Trenin D., 2007). Para pemikir strategis Rusia melihat AS sebagai “*dangerous nation*”. Dari perspektif politik, Rusia percaya bahwa setelah perang dingin berakhir, AS masih memandang Rusia sebagai lawan, seperti AS melihat China, Iran dan Korea Utara. Bagi Rusia, AS tidak menginginkan Rusia untuk menjadi negara yang kuat, AS menganggap Rusia sebagai pesaing yang kompetitif dan rival terkuatnya dalam kancah internasional. Sehingga perilaku dan kebijakan AS, terutama di area vital kepentingan Rusia seperti Eurasia menjadi suatu ancaman bagi Rusia dan kepentingan-kepentingan Rusia.

Respon Rusia melalui peningkatan militer merupakan bentuk reaksi Rusia terhadap perluasan keanggotaan yang dilakukan oleh NATO di Eropa Timur. Perluasan ini dianggap dapat merusak tatanan global, serta mengancam keamanan nasional Rusia. Namun Politik Luar Negeri Rusia tetap memainkan peranan yang dominan di negara-negara bekas pecahan Uni Soviet tersebut dan menjadi aktor aktif yang berpengaruh dalam masalah-masalah Internasional.

Perluasan Keanggotaan NATO di Eropa Timur termasuk dalam politik luar negeri sebagai bentuk perilaku atau aksi. Semua yang dilakukan Rusia tidak lebih karna keadaan yang memaksa melakukan reaksi. Jadi perluasan NATO ke Eropa Timur, terutama ke 3 negara Baltik yang merupakan negara pembentuk kesatuan Uni Soviet, adalah ancaman menurut Rusia. Rusia merasa Negara-negara bekas Uni Soviet merupakan warisan yang sangat penting bagi Rusia, karena Rusia selalu ingin menekan penguasaan terhadap negara-negara tersebut. Oleh karena itu Rusia sangat terancam karena dampak-dampak perluasan keanggotaan NATO ke Eropa Timur dapat mengancam keamanan geopolitik Rusia. Mengancam keamanan yang dimaksud yaitu:

1. Rusia semakin kehilangan pengaruhnya di negara-negara post-Soviet dan akan membuat Rusia menjadi terisolir
2. Dapat mempengaruhi pencapaian kepentingan Nasional Rusia dalam upaya kekuasaannya di negara-negara CIS
3. Hilangnya kawasan penyangga serta kawasan rute minyak dan gas di laut Kaspia yang sudah lama dalam kekuasaan Rusia
4. Serta berpengaruh pada Keamanan Nasional Rusia

Jadi hal-hal tersebut yang membuat Rusia sangat menentang adanya perluasan keanggotaan NATO ke Eropa Timur. Perluasan NATO ke Eropa Timur merupakan bentuk aksi yang dimana mendapat tanggapan pro dan kontra dari kawasan Eropa Timur itu sendiri. Namun aksi NATO tersebut mendapatkan kecaman keras dari Rusia yaitu dengan meningkatkan militernya supaya kawasan bekas Uni Soviet berfikir ulang untuk bergabung, hal tersebut merupakan bentuk reaksi Rusia terhadap langkah-langkah NATO memperluas anggotanya yang dimana diyakini Rusia dapat mengganggu keamanan Nasional Rusia dan Rusia merasa terancam sehingga meningkatkan kapabilitas militernya.

